



Submitted

28 April – 2021

Revised

4 Oktober – 2021

Inisiated Publish

21 Oktober – 2021

AFFILIATION:

Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur

Co-Responding E-mail:

ratnapuspitasari31@yahoo.co.id
riantnd@yahoo.com

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian
Administrasi Publik
Program Studi
Administrasi Publik
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa
Timur

berkolaborasi dengan



Indonesia Association of
Public Administration Jawa
Timur

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR

Ratna Puspitasari, Riant Nugroho

ABSTRACT

The high youth unemployment rate in Indonesia (16.28%). Encouraging the Government to issue MBKM policies, with the aim of equipping university graduates to be able to compete in the world of work. The purpose of this study was to find out the implementation of the MBKM policy at FISIP UPNVJT and what were the obstacles. UPNVJT has implemented the MBKM policy since the beginning of the 2020 semester, as a PT that has just changed its status to a state, it is not easy for UPNVJT to implement the MBKM policy. This study uses a qualitative method with data sources from the Dean of the Faculty of Social Sciences, 4 coordinators of study programs, 1 guardian lecturer, 4 lecturers and 22 students of the Faculty of Social Sciences UPNVJT and literature review from several sources. The results of the research: MBKM policies are less effective and have not been implemented properly because: 1) It is difficult to convert courses 2) It is not easy to get partners 3) The collaboration process between universities is complicated 4) There are many programs and activities that must be implemented. 5) The system is not ready. 6) there is no compatibility between lectures and activities outside the study program. 7) the existence of quota determination. 7) HR issues. 8) Lack of support from students. 10) Network problem. Recommendations: 1) Focus on priorities to improve students' ability to compete in the world of work. 2) Prepare structures and infrastructure to properly support programs and activities. 3) Prepare qualified human resources. 4) Balancing between theory and practice through street vendors. 5) Require government officials, business actors, entrepreneurs, experts to teach as guest lecturers. 6) Lecturer exchange program, 7) Internships and regular KKN are improved. 8) Encouraging students to create jobs.

Keywords: Implementation, policy, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

ABSTRAK

Tingginya angka pengangguran muda di Indonesia (16,28%). Mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan MBKM, dengan tujuan membekali lulusan PT agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan MBKM di FISIP UPNVJT dan apa saja kendalanya. UPNVJT telah melaksanakan kebijakan mbkm sejak awal semester 2020, sebagai PT yang baru berubah status menjadi negeri, tidaklah mudah bagi UPNVJT untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dekan FISIP, 4 koorprodi, 1 dosen wali, 4 dosen dan 22 mahasiswa FISIP UPNVJT dan tinjauan pustaka dari beberapa sumber. Hasil penelitian: kebijakan MBKM kurang efektif dan belum terimplementasikan dengan baik karena: 1) Sulitnya mengkonversikan mata kuliah 2) Tidak mudah mendapat mitra kerja sama 3) Proses kerja sama antar PT yang rumit 4) Banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. 5) Sistem belum siap. 6) tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi. 7) adanya penetapan kuota. 7) Masalah SDM. 8) Kurangnya dukungan dari mahasiswa. 10) Masalah jaringan. Rekomendasi: 1) Fokus pada prioritas meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bersaing dalam dunia kerja. 2) Mempersiapkan struktur dan infrastruktur untuk menunjang program dan kegiatan dengan baik. 3) Mempersiapkan SDM yang mumpuni. 4) Menyeimbangkan antara teori dan praktek melalui PKL. 5) Mewajibkan pejabat pemerintah, pelaku usaha, entrepreneur, para ahli untuk mengajar sebagai dosen tamu. 6) Program pertukaran dosen, 7) Magang dan KKN regular ditingkatkan. 8) Mendorong mahasiswa menciptakan lapangan kerja.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka

PENDAHULUAN

Angka pengangguran muda di Indonesia menjadi masalah serius saat ini. Berdasarkan data BPS pada Februari 2020, 16,28 persen tingkat pengangguran terbuka didominasi usia 15-24 tahun, menempati posisi tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara sejak 25 tahun yang lalu di bawah Brunai Darussalam. *Co-Founder and Academic Advisor Prestasi Junior* Indonesia Robert Gardiner menyatakan, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran muda dikarenakan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan *skill* yang dibutuhkan oleh perusahaan. (Romys Binekasri, jawapos.com. 28/08/20.)

Pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Tinggi, dianggap belum semuanya mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja, memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai tuntutan *dalam dunia kerja*. Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) yang di gagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merupakan langkah awal bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang mumpuni di bidang ilmu dan teknologi, berkarakter dan dapat memenuhi tantangan dunia kerja. Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Pokok-pokok kebijakan “MBKM” ada 4 (empat) poin, diantaranya adalah: 1) Pembukaan program studi baru. 2) Sistem akreditasi perguruan tinggi. 3) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), dan 4) Hak belajar tiga semester di luar prodi.”

Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 18, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan: “masa dan beban belajar bagi mahasiswa dapat dilaksanakan dengan: mengikuti seluruh proses pembelajaran di kampus, selama 1 (satu) semester (20 sks) dan di luar kampus selama 2 (dua) semester (40 sks), baik dengan program studi yang sama atau berbeda, dan/atau mempunyai pilihan untuk melakukan pembelajaran/kegiatan di luar kampus sesuai prasyarat yang telah ditentukan. Bentuk pembelajaran/kegiatan di luar kampus sesuai pasal 15 ayat 1 berupa: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja; asisten mengajar di satuan pendidikan; penelitian/riset; proyek kemanusiaan; kegiatan wirausaha; studi/proyek independen; dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

Kebijakan “MBKM” di harapkan mampu untuk menjawab permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dan adanya kegiatan-kegiatan di luar kampus yang memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mahasiswa, di harapkan mahasiswa memiliki nilai tambah dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan di masa depan.

UPN “Veteran Jawa Timur, (UPNVJT) sebagai salah satu PTN di Indonesia telah melaksanakan kebijakan MBKM sejak awal semester 2020, salah satu yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi mahasiswa untuk memberikan hak belajar tiga semester di luar prodi.

Dalam melaksanakan kebijakan “MBKM” di FISIP UPNVJT, dibutuhkan persiapan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, diantaranya: kesiapan Fakultas, pejabat yang berwenang, dosen, mahasiswa, petugas pendukung, sarana dan prasarana, sistem, anggaran dan mitra kerja sama. Sebagai perguruan tinggi dengan status Kampus Bela Negara yang belum lama menjadi negeri, butuh penyesuaian bagi UPNVJT untuk melaksanakan kebijakan MBKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” diimplementasikan di FISIP UPNVJT dan apa saja kendala-kendala yang menghambat kebijakan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan MBKM di UPN “Veteran” Jawa Timur dan mengetahui kendala-kendalanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pelaksanaannya kebijakan MBKM mengalami beberapa kendala, pro dan kontra baik pada PTN dan PTS seperti yang di kemukakan oleh Syamsul Arifin dan Moh Muslim (2020), tantangan implementasi kebijakan MBKM di perguruan tinggi islam swasta di Indonesia diantaranya adalah: mekanisme kolaborasi; magang di luar program studi, dan pembiayaan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Susetyo (2020) memperkirakan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh PTN diantaranya adalah: tujuan pendidikan, kebijakan masih parsial, aturan atau panduan, pola pikir, penyusunan kurikulum, pelaksanaannya, kerjasama baik antar PT dan dengan industry atau perusahaan, dana, system administrasi akademik, pandemi Covid 19, penyiapan SDM. Kurniawan, Randi Saputra, Annisa Daulay, Zubaidah (2020) penerapan kebijakan MBKM belum terlaksana sepenuhnya, kendala: SDM dan fasilitas pendukung belum siap. Hendrik & Yandri (2020) menyatakan, dalam implementasinya kemerdekaan belajar masih menggunakan pembelajaran yang bersifat konvensional, ukuran keberhasilan mahasiswa masih pada penguasaan materi. Iqbal Lhutfi, Rika Mardiani (2020) kebijakan pendidikan di Indonesia yang berubah tiap ganti menteri kurang memperhatikan aspek keberlanjutan, banyaknya studi yang diambil mengganggu arah jalur studi. Fuadi, T.M. & Aswita, D. (2021), menyimpulkan, kebijakan MBKM PTS di aceh, yang terimplementasikan adalah program pertukaran pelajar antar prodi dalam dan antar perguruan tinggi, program mengajar di instansi pendidikan dan magang yang dibantu dari dana kementerian. Sementara Tantangan yang dihadapi PTS antara lain; proses adaptasi kurikulum, kampus mitra yang masih terbatas, kolaborasi yang masih sangat terbatas, dana, kualitas dan produktivitas SDM dosen dan mahasiswa. Sementara Nora Susilowati (2021). Memandang tujuan kebijakan MBKM berdasarkan filsafat pendidikan humanisme, melalui penerapan prinsip belajar humanistik (*learning how to learn*) dengan pengembangan *hard skill* dan *soft skill* akan menghasilkan lulusan yang siap dan relevan dengan tuntutan jaman. Muslikh (2020) berpendapat. kebijakan MBKM dapat terlaksana dengan baik bila ada landasan filosofi dan analisisnya.

Dari beberapa kajian diatas peneliti menggunakan literasi sebagai sumber penelitian, hanya Hendrik dan Yandri yang menggunakan data primer wawancara dengan 3 orang dosen dan 2 orang mahasiswa. Kelebihan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya, menggunakan data primer berupa wawancara yang mendalam dengan Dekan FISIP UPNVJT, 4 Koorprodi, 1 dosen wali, 4 Dosen dan 22 mahasiswa yang merupakan subyek dan obyek dari kebijakan. Selain itu status UPNVJT sebagai Kampus Bela Negara menjadikan penelitian ini menarik, jika kebijakan MBKM dapat di implementasikan dengan baik, maka akan melahirkan lulusan yang mumpuni dalam *hard skill* dan *soft skill* serta berkarakter, nasionalisme dan cinta tanah air.

Konsep Kebijakan Publik

Thomas Dye (Kevin & Christopher, 2009, h3) mendefinisikan kebijakan sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*” Kebijakan “MBKM” merupakan keputusan pemerintah untuk memperbaiki system dan cara pembelajaran di Indonesia, khususnya perguruan tinggi, agar siap dan mampu bersaing secara global terutama dalam dunia kerja. Hal ini sejalan dengan pemikiran Lasswell dan Kaplan (Said zainal A. 2012, h. 6) melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan , nilai dan praktik “*a projected of goals, values and practices.*” Kevin dan Christoher mendefinisikan (2009, h.157) “*Implementation is what happen after government declares a formal intent to do something and before a policy outcome has been produced*”. Sementara Riant Nugroho (2014, h.129) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “...setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.

Implementasi Kebijakan

Wildavsky, at al (wayne Person : 2001, h.467) Mengemukakan “ Implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya atau melaksanakannya dari atas.” Kebijakan kampus merdeka, merdeka belajar merupakan proses yang melibatkan FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur, sebagai pelaksana kebijakan dari menteri pendidikan yang dilakukan secara *topdown*. Riant Nugroho (2004) hal.158 menyatakan” Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implentasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.” Graham T. Allison 1971 (Riant Nugroho: 2014, h.217) “memahami implementasi sebagai wacana antara kebijakan dan pelaksanaannya. Implementasi kebijakan dipercaya sebagai tindakan selanjutnya dari keputusan kebijakan, setidaknya tidak ada kesenjangan antara keputusan dan implementasi kebijakan.” Menurut Riant Nugroho (2014) hal. 686-689. Pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi untuk keefektivan implementasi kebijakan. 1) apakah kebijakan sendiri sudah tepat? 2) tepat pelaksanaannya. 3) tepat target. 4) Tepat lingkungan. 5) tepat proses. Secara umum implementasi kebijakan

publik terdiri dari tiga proses: *policy acceptance*, *policy adaption*, dan *strategic readiness*. Berkenaan dengan kesiapan strategis, maka ada 3 kesiapan strategis yang perlu dicermati untuk keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: Organisasional, manusia dan lingkungan. Kesiapan organisasional berkenaan dengan isu: 1) Apakah organisasi sudah mendapat mandat yang mencukupi untuk melaksanakan kebijakan. 2) Apakah organisasi memiliki sumber daya untuk implementasi yang mencukupi, baik dari struktur, system, manusia dan financial. 3) apakah organisasi sudah memiliki rencana implementasi dan infrastruktur implementasi di dalam organisasi yang mencukupi, yang mencangkup *roadmap*, *work-plan*, termasuk “*who doing what, when, where, dan how.*” Kesiapan manusia berkaitan dengan: 1) Apakah pemimpin organisasi sudah cakap memimpin pelaksanaannya, baik dari kualitas kepemimpinan yang berkenaan dengan visi, nilai, dan keberanian, maupun dari sisi ketrampilan, bagaimana menggerakkan manusia dalam organisasi dan diluar organisasi. 2) Apakah SDM di organisasi mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan motivasi yang cukup untuk menjadi pelaksana kebijakan. Kesiapan lingkungan berkenaan dengan dua hal, yaitu: 1) apakah lingkungan masyarakat dimana kebijakan akan diimplementasikan sudah siap menerima implementasi. 2) apakah lingkungan organisasi pemerintah dimana kebijakan akan diimplementasikan sudah siap menjadi mitra implementasi.”

Model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi Riant Nugroho (2004: 165-)

Pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan.

1. Dari atas ke bawah (*top-bottom*) → partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.
2. Dari bawah ke atas (*bottom-top*) → kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat.
3. Implementasi yang berpola paksa (*command-control*) → model yang mengedepankan monopoli mekanisme paksa dalam Negara, ada sanksi dan tidak ada insentif.
4. Mekanisme pasar (*economic-incentive*)

Model implementasi kebijakan Donald Van Meter, Carl Van Horn : implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Variable yang mempengaruhi kebijakan publik diantaranya adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik implementator.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari implementator.

Model implementasi Daniel Mazmanian, Paul A Sabatier.

Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan publik dalam tiga variable:

1. Variable independen.
2. Variable intervening.
3. Variable dependen.

Model Brian W. Hoogwood, Levis A. Gun. Untuk melakukan kebijakan diperlukan beberapa syarat:

1. Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga tidak akan menimbulkan masalah yang besar
2. Ketersediaan sumberdaya yang memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan pada urutan yang benar.

Model Merilee S Grindel.

Model Grindel ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Model Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern, David O'Porter.

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau melibatkan pejabat pemerintah di tataran bawah.

Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM)

Berdasarkan buku panduan MBKM:

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di gagas oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Harapan dari kebijakan ini adalah: untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai perkembangan jaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, serta dinamika masyarakat. Tujuan "hak belajar tiga semester di luar program studi" pada kebijakan MBKM untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *hard skills* maupun *soft skills*, agar lulusan PT siap sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian sesuai dengan passion dan bakatnya dan relevan dengan kebutuhan jaman.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka “Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi”

A. Persyaratan umum.

Program "hak belajar tiga semester di luar program studi", yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi maupun mahasiswa diantaranya:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan

1. Peran Pihak-Pihak Terkait

a. Perguruan Tinggi

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
2. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
3. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas

1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.

4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

METODE

Menurut Bagdan dan Taylor (Moleong, 2004.) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan kebijakan MBKM di UPNVJT. Jenis penelitian ini bersifat deskriptis, yang mencoba menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus merdeka” khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di FISIP UPNVJT. Lokasi penelitian di FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan UPNVJT merupakan PT yang belum lama berubah status menjadi negeri, sehingga untuk melaksanakan program dan kegiatan MBKM perlu adanya beberapa penyesuaian, kesiapan dan kendala-kendala. Informan dalam penelitian ini adalah: Dekan, 4 Koorprodi, 1 dosen wali/pembimbing dan 22 mahasiswa FISIP UPNVJT. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan: teknik wawancara, wawancara tertulis dan data sekunder yang menunjang penelitian. Teknik pengolahan data pada penelitian kualitatif ini berdasarkan pada Miles dan Huberman (1992. hal.20) meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPN “Veteran” Jawa Timur disingkat UPNVJT merupakan salah satu PTN di Indonesia yang berlokasi di Surabaya. Sebagai kampus “Bela Negara” UPNVJT telah mendidik mahasiswa untuk

berkarakter bela negara dengan mengajarkan multikultural dan toleransi, sesuai dengan tujuan dari salah satu kebijakan MBKM melalui pertukaran pelajar, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Saifudin & Zuhri (2020) menyimpulkan bahwa: UPNVJT telah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter dengan memberikan mata kuliah bela negara pada mahasiswa, selain itu toleransi beragama telah di terapkan di lingkungan kampus UPNVJT.

Salah satu fakultas yang ada di UPNVJT adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang berdiri sejak tahun 1993. FISIP UPNVJT terdiri dari: Administrasi Publik (akreditasi A), Administrasi Niaga (akreditasi A). Ilmu Komunikasi (akreditasi A) Hubungan Internasional (akreditasi B) diikuti oleh Prodi baru, Pariwisata pada tahun 2020. Sejak semester gasal 2020, UPNVJT telah mendukung kebijakan MBKM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, secara *soft skills* maupun *hard skills*, agar *survive* dan dapat bersaing dalam dunia kerja untuk mahasiswa angkatan 2018, 2019 dan 2020, melalui program Permadi (pertukaran mahasiswa antar prodi) di UPNVJT. Program Permata Sakti (Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi), merupakan program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di Indonesia, dan Permata Merdeka, program pertukaran mahasiswa dengan mengambil mata kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mitra, yang terdiri dari 43 PTN di Indonesia. selain itu sebagai kampus bela Negara UPNVJT memadukan kurikulum MBKM dengan kurikulum pendidikan karakter yang dilaksanakan secara langsung berupa *outbond* bela negara untuk membentuk kedisiplinan, pantang menyerah dan jiwa tolong menolong. (Ananda Y. Pahlawan, Rizky Priyansyah, Moch A. Mashuri, 2020)

Untuk mengawali program dan kegiatan MBKM, UPNVJT terlebih dahulu menjalin kerjasama antar UPN yang terdiri dari UPN “Veteran” Yogyakarta dan UPN “Veteran” Jakarta. Pada saat kuliah daring, kegiatan yang paling memungkinkan adalah pertukaran mahasiswa. Untuk mitra kerja di luar PT FISIP UPNVJT telah menjalin MoU dengan instansi pemerintah, dan beberapa perusahaan yang berkenaan langsung dengan jurusan di masing-masing prodi. Graham T. Allison 1971 (Riant Nugroho, 2014, h. 217) menyatakan “implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan, dimana tidak ada kesenjangan antara keputusan dan implementasi kebijakan.” Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dengan buku panduan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Fakultas:

1. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.

FISIP UPNVJT, telah menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil mahasiswa lintas Prodi. Masing-masing koorprodi berkoordinasi dengan dosen-dosen pengajar beserta Badan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, diberi keleluasaan untuk menyusun kurikulum MBKM dan

menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas prodi baik Permadi, Permata-Sakti maupun Permata Merdeka. Untuk saat ini masing-masing prodi sudah menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan sudah memenuhi kuota (20-40 mahasiswa).

2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

FISIP UPNVJT telah menyiapkan MoU/SPK dengan beberapa kampus negri, terutama dengan sesama UPN dan beberapa mitra, baik instansi pemerintah maupun perusahaan yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa di luar prodi. Beberapa mitra kerjasama FISIP UPNVJT merupakan perusahaan berskala nasional dan beberapa perusahaan rintisan *startup* yang sudah beroperasi selama 2 tahun, selain itu FISIP UPNVJT juga bekerjasama dengan instansi pemerintah melalui MoU dengan kementerian terkait. Pada tataran fakultas kendala dari kebijakan MBKM adalah: 1) Sulitnya mengkonversikan mata kuliah yang akan di tawarkan, dengan mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. 2) Untuk mendapat mitra kerjasama yang sesuai dengan standar kemendikbud berdasarkan buku panduan MBKM, tidaklah mudah, beberapa perusahaan yang berskala besar meminta prasyarat dan adanya sistem seleksi untuk melakukan kerjasama.

Tugas dan Fungsi Program studi:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

Koorprodi FISIP UPNVJT bersama dosen dan Badan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi telah menyusun dan menyesuaikan kurikulum bela negara dengan kurikulum MBKM. Masing-masing koorprodi diberi keleluasaan untuk menyusun kurikulum yang dapat mendukung prodi dan kompetensi mahasiswa secara fleksibel dan mudah di implementasikan serta dapat memberi peluang bagi mahasiswa agar bisa belajar di luar prodi. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah: menyesuaikan mata kuliah dengan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) mahasiswa, mengkonversikan mata kuliah yang diambil mahasiswa lintas prodi dengan mata kuliah yang sesuai dengan CPL dalam prodi atau mengkonversikan sebagai mata kuliah pilihan.

2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.

FISIP UPNVJT telah memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas prodi dalam perguruan tinggi dengan melakukan sosialisasi, beberapa kali koorprodi dan dosen memberikan sosialisasi, baik secara khusus atau pada saat mengajar. Dosen pembimbing memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa mengenai kelebihan dan keuntungan bila mengambil mata kuliah lintas prodi yang menunjang CPL-nya. Koorprodi menyesuaikan dan menyusun kurikulum berdasarkan MBKM yang fleksibel dan menunjang kompetensi mahasiswa. Selain itu FISIP UPNVJT telah mengeluarkan SOP untuk program dan

kegiatan BMKM yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui prosedur dan prasyarat untuk mengikuti program dan kegiatan yang ditawarkan. Sistem juga telah disiapkan guna menunjang kegiatan ini.

3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.

FISIP UPNVJT melalui masing-masing prodi sudah menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi dengan persyaratan yang telah disepakati antar perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan FISIP UPNVJT berdasarkan buku pedoman MBKM, beberapa prodi menyiapkan mata kuliah yang tidak diajarkan pada kampus lain, sehingga menarik mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah tersebut dengan kuota 20-40 mahasiswa.

4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.

Dalam melaksanakan semua kegiatan untuk mendukung program “MBKM”, FISIP UPNVJT melakukan sesuai mandat yang telah diberikan pada masing-masing pejabat yang berwenang salah satunya dengan melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Mata kuliah yang diambil mahasiswa dapat dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di prodi, walaupun mata kuliah tersebut tidak ada dalam prodi, asal mendukung kompetensi mahasiswa dapat di konversikan sebagai mata kuliah pilihan.

5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternative mata kuliah daring.

Saat ini karena pandemi Covid 19, seluruh pembelajaran dan kegiatan dilakukan secara daring.

Kendala dari program studi adalah: 1) Sulitnya mengkonversikan mata kuliah, selain jumlah sks, mata kuliah yang sesuai, seringkali mata kuliah yang akan dikonversikan telah diambil oleh mahasiswa pada semester yang lalu. 2) Sistem yang menunjang penyelenggaraan MBKM belum sepenuhnya siap. 3) Pemahaman tentang program “MBKM” tiap-tiap Fakultas atau Perguruan tinggi dimaknai berbeda-beda, belum adanya satu kata, sehingga sulit diimplementasikan. 4) kurangnya dukungan dari mahasiswa. 5) Tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi. 6) Banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan, menyulitkan implementor. 7) Masalah jaringan.

Tugas dan Fungsi Mahasiswa:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.

FISIP UPNVJT, melalui koorprodi telah menyiapkan dosen pembimbing untuk masing-masing kegiatan, dimana mahasiswa dapat berdiskusi dan bimbingan kegiatan MBKM. Antusias mahasiswa pada program dan kegiatan MBKM tidak sama, ada mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program MBKM, ada juga yang masih menunggu semester depan, hal ini karena terkendala: 1) Sistem yang belum siap, sehingga sering kali informasi berubah-ubah dan terlambat diterima oleh mahasiswa, sementara untuk mengambil mata kuliah atau program di luar prodi, di batasi oleh kuota dan waktu pendaftaran. 2) Dosen pembimbing kurang menguasai program MBKM, sehingga informasi yang diberikan belum memuaskan mahasiswa. 3) Mahasiswa enggan mengambil matakuliah luar prodi karena takut tidak dapat mengikuti mata kuliah tersebut dengan baik, karena tidak mendapat materi dari awal/dasar. Adanya prasyarat dan seleksi yang tidak dapat dipenuhi oleh mahasiswa.

2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.

Bentuk kegiatan pembelajaran di dalam dan luar prodi meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Atas arahan dan bimbingan koorprodi dan dosen pembimbing sudah ada beberapa mahasiswa FISIP UPNVJT yang mendaftar program kegiatan luar prodi.

Sementara ini, kegiatan yang sudah berjalan adalah: pertukaran pelajar, praktek magang bersertifikat, KKN tematik dan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tidak semua mahasiswa tertarik dengan kegiatan ini, hal ini dikarenakan adanya kendala sistem, *prasyarat dan seleksi untuk mengikuti kegiatan*.

3 Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.

Bersama koorprodi dan dosen pembimbing, mahasiswa yang ingin mengambil kegiatan luar prodi mempersiapkan prasyarat yang harus dipenuhi. Beberapa mahasiswa mencoba untuk mengikuti kegiatan luar prodi, ada beberapa yang tidak lolos seleksi. Untuk kegiatan pertukaran pelajar, tidak ada seleksi, hanya saja dibatasi oleh waktu dan kuota. Kendala pada program ini adalah sistem yang kurang menunjang.

4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

FISIP UPNVJT telah mendukung dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai dengan pedoman akademik dengan arahan dari rektor berdasarkan Permendikbud dan beberapa peraturan pendukung. Untuk memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut UPNVJT memiliki SOP MBKM yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa untuk mengikuti program dan

kegiatan. Tetapi tidak semua mahasiswa dapat mengikuti program ini, dikarenakan adanya kuota, prasyarat dan seleksi membuat sebagian mahasiswa memilih program reguler yang diselenggarakan kampus.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan MBKM di UPNVJT mengalami kendala, yang hampir sama dengan PT lainnya, yang telah di perkirakan oleh Susetyo (2020), penelitian Syamsul Arifin dan Moh Muslim (2020), *Kurniawan, Randi Saputra, Annisa Daulay, Zubaidah (2020) Hendrik & Yandri (2020) Iqbal Lhutfi, Rika Mardiani (2020). Fuadi, T.M. & Aswita, D. (2021). Egi Abinowi (komunita.widyatama, 31/3/21) Mohammad Bernie (Tirto.id, 30/1/20)*. Selain itu banyaknya program dan kegiatan yang harus dilakukan dengan cepat, membuat sulitnya implementor untuk mengimplementasikan program dan kegiatan MBKM. Menurut Riant Nugroho (2014, h. 689) ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi agar implementasi kebijakan efektif: 1) Apakah kebijakan sendiri sudah tepat? 2) tepat pelaksanaannya. 3) tepat target. 4) Tepat lingkungan. 5) tepat proses.

Kebijakan MBKM, berdasarkan 5 tepat, 1) kebijakan MBKM kurang tepat, tidak ada prioritas dari kegiatan, terkesan tergesa-gesa di implementasikan. 2) pelaksanaan kegiatan MBKM dilakukan dalam waktu yang singkat maka banyak kendala yang harus dihadapi PT diantaranya: sistem belum dapat menunjang kegiatan, kesulitan menyamakan waktu perkuliahan dan kegiatan di luar prodi, konversi mata kuliah dan persyaratan lain yang harus dipenuhi PT untuk melaksanakan kegiatan. 3) Target kurang tepat. Target MBKM adalah seluruh mahasiswa di Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja, tetapi pada prakteknya ada kuota, prasyarat dan seleksi, sehingga tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. 4) Tepat lingkungan: tidak semua PT di dukung oleh lingkungan kebijakan MBKM yang tepat, lokasi PT, SDM, sistem yang tidak sama pada masing-masing PT dan dukungan dari pelaksana kegiatan. 5) Dari segi ketepatan proses yang terdiri dari: penerimaan kebijakan, adaptasi kebijakan, dan kesiapan strategis. Penerimaan kebijakan MBKM, dimaknai berbeda-pada pada masing-masing PT di Indonesia, sehingga sulit untuk menyamakan persepsi dalam menjalin kerjasama antar PT. Dalam adaptasi kebijakan masing-masing PT masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kebijakan MBKM, sehingga masih memilih kegiatan reguler yang telah diselenggarakan kampus. Pada kesiapan strategis berkenaan dengan sumber daya belum mencukupi terkait dengan belum siapnya sistem untuk menunjang program dan kegiatan, sulitnya koordinasi dan membuat kesepakatan antar PT dan mitra dalam melakukan kerjasama program dan kegiatan membuat kebijakan ini kurang efektif untuk di implementasikan, salah satunya di FISIP UPN V JT.

KESIMPULAN

FISIP UPNVJT telah melaksanakan program dan kegiatan MBKM sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta telah melaksanakan pendidikan bela negara, yang berkarakter, multikultural dan toleransi.

Untuk mendukung pelaksanaan dan program MBKM, FISIP UPNVJT telah memfasilitasi mahasiswa dengan membuat SOP MBKM, kurikulum MBKM, menunjuk dosen pembimbing, melakukan MoU dan menjalin kerjasama baik antar PTN di seluruh Indonesia melalui Permata Sakti dan Permata Merdeka serta MoU dengan mitra yang relevan. Namun demikian implementasi program dan kegiatan MBKM di FISIP UPNVJT, belum terimplementasikan dengan baik, dari 8 kegiatan, baru 4 yang terlaksana, diantaranya: Pertukaran Pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan dan KKN tematik.

Kendala yang dihadapi UPNVJT diantaranya, adalah: 1) Sulitnya mengkonversikan mata kuliah 2) Tidak mudah untuk mendapat mitra kerjasama dan melaksanakan kegiatan di luar prodi 3) Proses kerjasama antar PT yang rumit, pemahaman tentang program “MBKM” tiap-tiap Fakultas atau Perguruan tinggi dimaknai berbeda-beda. 4) Banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat dan bersamaan. 5) Sistem yang belum sepenuhnya siap menunjang program dan kegiatan. 6) Tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi. 7) Adanya kuota yang terbatas pada program pertukaran pelajar. 7) Dosen pembimbing kurang menguasai program MBKM, sehingga informasi yang diberikan belum memuaskan mahasiswa. 8) Kurangnya dukungan dari mahasiswa. 10) Masalah jaringan.

Faktor lain yang menyebabkan kebijakan MBKM belum terimplementasi di FISIP UPNVJT adalah: kebijakan MBKM sendiri dirasa kurang efektif, hal ini karena: 1) Tujuan kebijakan MBKM menjadikan mahasiswa di Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja, prakteknya ada pembatasan kuota pada program pertukaran pelajar serta adanya prasyarat dan seleksi bagi kegiatan diluar prodi. Sehingga tidak semua mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi sesuai harapan dari kebijakan MBKM. 2) Letak geografis, status PT, kesiapan sistem dan SDM untuk menunjang program dan kegiatan MBKM masih menjadi kendala. 3) Tidak semua PT di dukung oleh lingkungan kebijakan MBKM yang tepat, 4) Dari segi ketepatan proses yang terdiri dari: penerimaan kebijakan, adaptasi kebijakan, dan kesiapan strategis. Penerimaan kebijakan MBKM, dimaknai berbeda-beda pada masing-masing PT di Indonesia. Dalam adaptasi kebijakan masing-masing PT masih mengalami kesulitan dalam mengkonversi mata kuliah, merubah kurikulum menjadi kurikulum MBKM, menyelaraskan perbedaan waktu awal perkuliahan dengan program dan kegiatan MBKM. Pada kesiapan strategis berkenaan dengan sumber daya masih belum mencukupi, sdm yang menunjang sistem, dosen, pembimbing serta rendahnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Kesiapan penerima implementasi baik fakultas dan mahasiswa masih kurang, Sementara lingkungan di

Luar kampus, mitra dan PT lain mengalami kendala yang sama. Waktu yang dinilai terlalu singkat untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM membuat kebijakan ini kurang efektif untuk diimplementasikan, salah satunya di FISIP UPNVJT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul & Muslim, Mohammad. 2020. Tantangan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada perguruan tinggi islam swasta di indonesia. *eJurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3 (1), 589-600
- Buku Panduan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM (2020) <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Panduan-Penyusunan-Kurikulum-Pendidikan-Tinggi-MBKM.pdf>
- Fuadi, T.M. & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Panduan singkat magang dan studi independen bersertifikat untuk mahasiswa. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Panduan-Pendaftaran-Magang-Studi-Independen-Bersertifikat.pdf>
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Panduan singkat magang dan studi independen bersertifikat untuk mahasiswa. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Panduan-Pendaftaran-Magang-Studi-Independen-Bersertifikat.pdf>.
- Kurniawan N, Saputra R, Daulay AR, Zubaidah Z. 2020. Implementasi Prinsip-Prinsip Merdeka Belajar Bag Caloni Konselor. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang*. 69-72.
- Lao, H.A.E. & Hendrik, Y.Y.C. (2020). Implementasi Kebijakan Kemerdekaan Belajar Dalam Proses Pembelajaran Di Kampus IAKN Kupang-NTT. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 4(2), 201–209.
- Lutfi, I. Mardianai, R (2020). Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy: How Does It Affect the Sustainability on Accounting Education in Indonesia? *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 15 (2): 243-253.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexi, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Muslikh. (2020). Landasan Filosofi dan Analisis Terhadap Kebijakan MBKM. *Jurnal Syntax Transformation*, 1 (3): 40-46.

- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. 3rd ed. Jakarta: PT Gramedia .
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. 5nd ed. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pahlawan A.Y., Priyansyah R., Mashuri M.A. 2020, Penerapan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dalam Pembentukan Mahasiswa Berkarakter Multikultural (Studi UPNVJT), Public Administration Journal of Research, 2 (3), 326-335
- Parsons, Wayne. 2005. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. Nomor 3 Tahun 2020 (2020).
<https://lldikti13.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2020/01/Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020.pdf>.
- Purwanto, Agus & Sulistyastuti R. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Said zainal A. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Smith K, Larimer C. 2009. The Public Policy Theory Primer. Philadelphia: Westview Press
- SOP Merdeka Belajar Kampus Merdeka UPN “Veteran” Jawa Timur <https://upttik.upnjatim.ac.id/faq/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Sop-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-UPNVJT-2020-1.pdf>.
- Susetyo. 2020. Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Open Journal Sistem Universitas Bengkulu. 3 (1), 29-43
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. Jurnal Sikola, 2 (3): 203-219.
- Zuhri, Saifuddin. 2020. Pentingnya budaya literasi media dan aktualisasi bela negara generasi milenial. Public Administration Journal of Research, 2 (4), 393-405.

